

PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA DALAM MELAKUKAN POLITICAL LINKAGE PASCA ELEKTORAL DI MADRASAH ALIYAH AL-IHSAN KREBET BULULAWANG KAB MALANG

M. Barqah Prantama

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
barqahprantama@ub.ac.id

Abstrak

Dalam konteks demokrasi, proses politik tidak berhenti pada tahapan elektoral. Tantangan utama pasca pemilu adalah menjaga keterhubungan antara lembaga politik dan masyarakat agar terjalin ekosistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam membangun dan mempertahankan political linkage pasca elektoral di Madrasah Aliyah Al-Ihsan Kretet, Bululawang, Kabupaten Malang. Melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi need assessment, pelatihan tentang politik partisipatif, hak politik warga, serta optimalisasi teknologi dalam komunikasi politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, dalam memperkuat relasi antara lembaga politik dan masyarakat. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong keberlanjutan komunikasi politik dan membangun kesadaran demokratis di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci:

political linkage; partisipasi politik; penguatan kapasitas

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi untuk menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan negara. Namun, proses demokratisasi tidak berhenti pada pemungutan suara, melainkan menuntut adanya kesinambungan relasi antara lembaga politik dan masyarakat setelahnya. Tantangan pasca pemilu kerap muncul dalam bentuk menurunnya partisipasi masyarakat, lemahnya komunikasi politik, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Kondisi ini dapat menyebabkan apatisisme politik dan polarisasi sosial yang menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.

Konsep political linkage menjadi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Keterhubungan politik yang baik antara lembaga politik dan masyarakat tidak hanya memperkuat representasi politik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga publik. Dalam konteks lokal, Madrasah Aliyah Al-Ihsan Kretet, Bululawang, sebagai bagian dari masyarakat pendidikan, memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik, khususnya bagi pemilih pemula. Para siswa yang telah memasuki usia 17 tahun berpotensi menjadi aktor politik

baru yang kritis dan partisipatif, namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang belum memahami hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam melakukan political linkage pasca elektoral. Penguatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang menekankan pentingnya komunikasi politik inklusif, transparansi, serta pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun praktik politik yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan pada keterlibatan aktif mitra dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini memposisikan Madrasah Aliyah Al-Ihsan Kreet sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kegiatan, sehingga mitra berperan langsung dalam proses identifikasi permasalahan, perumusan alternatif solusi, hingga pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Melalui PRA, proses pengabdian berlangsung secara partisipatif, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan nyata mitra.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan need assessment melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta focus group discussion (FGD) dengan pihak madrasah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki mitra. Temuan dari proses asesmen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang desain kegiatan, menyusun materi pelatihan, serta menentukan strategi pelaksanaan yang relevan dan aplikatif sesuai dengan kondisi mitra.

Tahap pelaksanaan kegiatan diwujudkan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi yang mencakup materi mengenai rekognisi politik partisipatif, pemahaman hak politik warga negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi politik. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengombinasikan berbagai metode, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, brainstorming, serta pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*problem solving-based learning*). Penerapan metode tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif peserta, meningkatkan kesadaran politik, serta memperkuat kapasitas kelembagaan mitra dalam membangun dan menjaga keterhubungan yang konstruktif dengan masyarakat.

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada evaluasi dan analisis data untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan melalui survei dan observasi guna mengukur perubahan tingkat pemahaman dan partisipasi peserta setelah mengikuti kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian program. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan publikasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Madrasah Aliyah Al-Ihsan Krebet Bululawang Kabupaten Malang” dilaksanakan sebagai respon terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pasca pemilu dan lemahnya kapasitas lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan politik antara warga dan institusi politik. Kegiatan ini berfokus pada upaya memperkuat pemahaman dan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengembangkan komunikasi politik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan need assessment dan *focus group discussion* (FGD) dengan guru serta siswa Madrasah Aliyah Al-Ihsan untuk memetakan tingkat pemahaman awal terhadap isu partisipasi politik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memahami politik sebatas proses elektoral dan belum melihat pentingnya keterlibatan warga pasca pemilu. Selain itu, lembaga mitra belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pendidikan politik secara sistematis. Kondisi ini memperkuat relevansi pelaksanaan pengabdian sebagai sarana peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus penanaman nilai-nilai demokratis sejak dini.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan simulasi, yang meliputi empat materi pokok: (1) rekognisi politik partisipatif, (2) hak politik warga negara, (3) hak akses terhadap dana publik, dan (4) penguatan komunikasi politik berbasis media digital. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, brainstorming, serta problem-based learning untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Hasil observasi menunjukkan antusiasme tinggi dari guru dan siswa, yang tercermin dari keterlibatan lebih dari 85% peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta juga menghasilkan gagasan tindak lanjut berupa pembentukan “Forum Siswa Demokratis” sebagai wadah pembelajaran politik di lingkungan madrasah. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan pemahaman peserta pelatihan terkait pemahaman literasi politik dan pemahaman peran lembaga pendidikan terhadap proses politik pasca elektoral dari 60% menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al – Ihsan selaras dengan hasil yang dicapai yang tercermin pada presentasi hasil pelaksanaan pre-test.

Tabel 1. Hasil persentasi pre dan post test

No	Indikator	Jumlah Pertanyaan	Persentase
1	Pre - Test	10	60%
2	Post - Test	10	90%

Tahap evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula dan mendorong perubahan sikap dari pasif menjadi aktif. Guru dan pihak madrasah menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan publik. Sebagai tindak lanjut, Madrasah Aliyah Al-Ihsan berkomitmen mengintegrasikan materi politik partisipatif dalam kegiatan ekstrakurikuler OSIS dan kegiatan keagamaan agar terbentuk budaya politik yang sehat di kalangan siswa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penguatan Kapasitas Lembaga dalam Melakukan Political Linkage Pasca Elektoral di Madrasah Aliyah Al-Ihsan Krebet Bululawang Kabupaten Malang telah mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan. Melalui pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan guru dan siswa sebagai pemilih pemula. Mitra mampu memahami pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menjaga keterhubungan antara masyarakat dan lembaga politik setelah pemilu berlangsung.

Kegiatan ini menghasilkan perubahan nyata berupa terbentuknya forum siswa sebagai wadah pembelajaran politik di lingkungan madrasah dan meningkatnya kapasitas guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap proses politik di sekitar peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelibatan langsung masyarakat pendidikan dalam proses pembelajaran politik berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi politik dan partisipasi pasca elektoral. Program ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan pendidikan politik berbasis partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Carothers, T., & Youngs, R. (2015). *The Complexities of Global Democracy*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.

- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra). *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing.
- Mounk, Y. (2018). *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Suseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok : Puskapol FISIP UI
- Wahl, F. (2019). Political participation and economic development. Evidence from the rise of participative political institutions in the late medieval German Lands. In *European Review of Economic History*.
<https://doi.org/10.1093/ereh/hey009>
- Or, M. H., & Berkovich, I. (2021). Participative decision making in schools in individualist and collectivist cultures: The micro-politics behind distributed leadership. *Educational Management Administration and Leadership*.
<https://doi.org/10.1177/17411432211001364>